

ORIENTASI CPNS PEMERINTAH KOTA BATAM

Disampaikan pada Pembekalan Calon PNS
Di lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2023

Lokus Orientasi :
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM

Batam, 22 Februari 2023

H.JEFRIDIN, M.Pd
Sekretaris Daerah
Kota Batam



VISI
Terwujudnya Batam
Sebagai Bandar Dunia
Madani yang Modern
dan Sejahtera

MISI

1

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.

2

Mewujudkan pembangunan kota Batam yang berkelanjutan didukung infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju, ramah, aman, asri dan nyaman sesuai tata ruang.

3

Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, produktif dan berakhlak mulia.

4

Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.

5

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsive, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



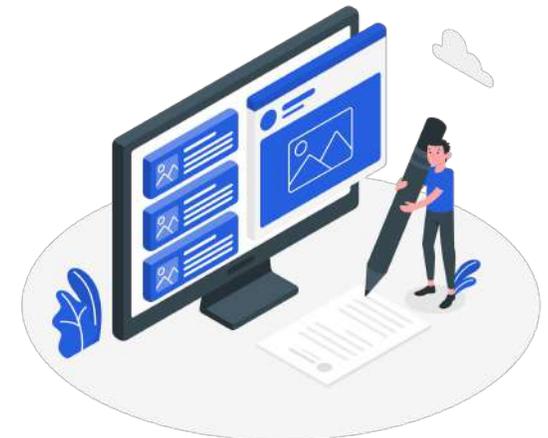
KEYWORDS VISI KOTA BATAM

❑ **Madani** : Pembangunan Kota Batam diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang berkarakter, berperadapan, sopan santun, disiplin serta berbudaya tinggi, berbanding lurus dengan konsep civil society

❑ **Modern** : sebagai sikap, cara berfikir, dan cara bertindak yang produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan inofatif dengan mengedepankan tatanan social yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

❑ **Bandar Dunia** : Kota Batam diarahkan menjadi kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi “centre of excellence”

❑ **Sejahtera** : kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin meliputi kondisi yang baik di tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan, rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensi yang ada



BEST PRACTICES



70 % Lebih APBD Kota Batam dialokasikan untuk Belanja Langsung, sebagian besar digunakan untuk INFRASTRUKTUR dan hanya 30% digunakan untuk Belanja Tidak Langsung.



Penggunaan APBD Kota Batam dilaksanakan dengan menggunakan asas efisiensi dan efektif dan berpihak kepada kepentingan publik.



Pembangunan infrastruktur merupakan prioritas dalam penggunaan APBD baik melalui anggaran yang dikelola oleh OPD maupun melalui skema pemberdayaan masyarakat (PIK)

Focus Utama Pembangunan



Susunan Perangkat Daerah Kota Batam

PERDA KOTA BATAM NO. 1 TAHUN 2021

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam

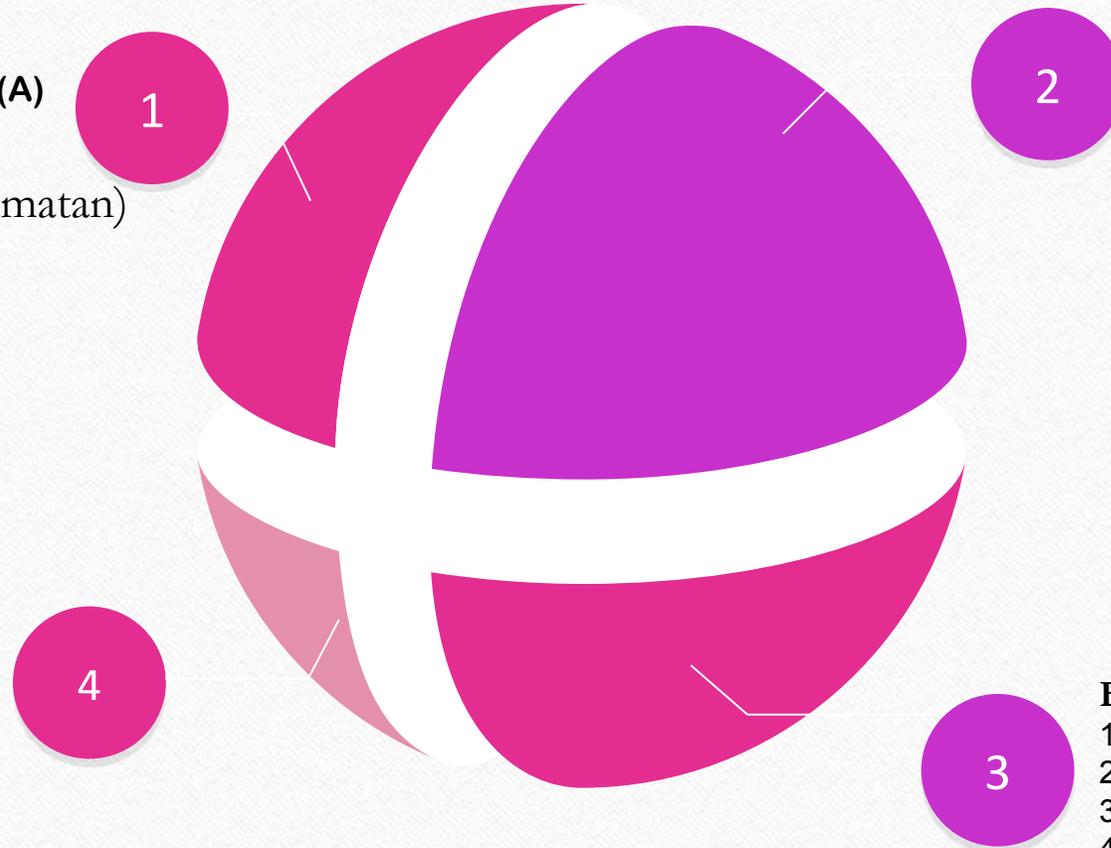
Perangkat
Daerah &
Tipeologinya

PERANGKAT DAERAH:

1. SEKRETARIAT DAERAH (A)
2. SEKRETARIAT DPRD (A)
3. INSPEKTORAT DAERAH (A)

KECAMATAN (12 Kecamatan)

1. Belakang Padang (A)
2. Batu Ampar (A)
3. Sekupang (A)
4. Nongsa (A)
5. Bulang (A)
6. Lubuk Baja (A)
7. Sungai Beduk (A)
8. Galang (A)
9. Bengkong (A)
10. BATam Kota (A)
11. Sagulung (A)
12. Batu Aji (A)



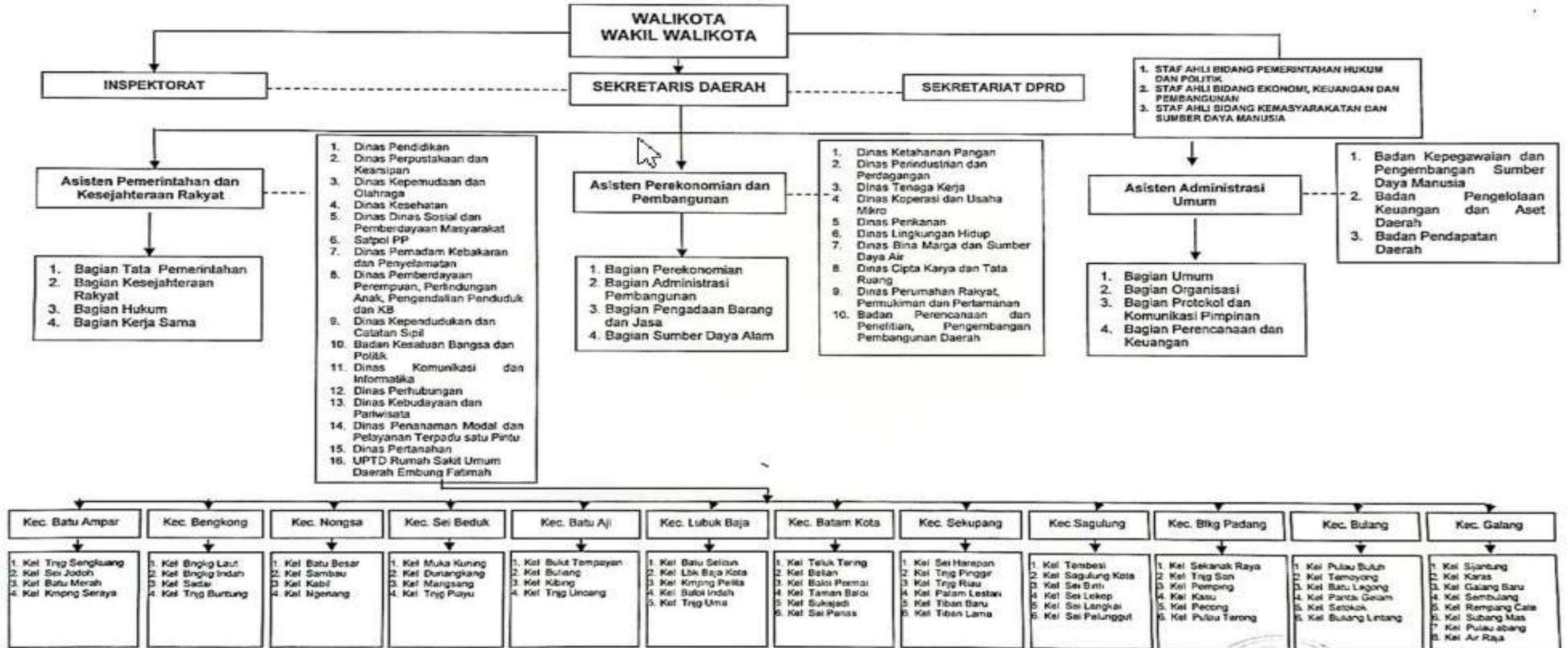
DINAS DAERAH (24 PD)

1. Dinas Pendidikan (A)
2. Dinas Kesehatan (A)
3. Dinas Bina Marga dan SDA (A)
4. Dinas Cipta Karya dan TR (A)
5. Dinas Perkim dan Pertamanan (B)
6. Satpol PP (A)
7. Dinas Pemadam Kebakaran (B)
8. Dinas Sosial dan PM (A)
9. Dinas Tenaga Kerja (A)
10. Dinas Pemberdyn Perempuan , PAPPKB (A)
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (A)
12. Dinas Perikanan (A)
13. Dinas Pertanahan (B)
14. Dinas Lingkungan Hidup (A)
15. Dinas Kependudukan dan Capil (A)
16. Dinas Perhubungan (A)
17. Dinas Kominfo (A)
18. Dinas Koperasi dan UM (A)
19. Dinas Penanaman Modal PTSP (A)
20. Dinas Kepemudaan dan OR (B)
21. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (A)
22. Dinas Perpustakaan dan Arsip (B)
23. Dinas Perindag (A)
24. UPTD RSUD EF Pada Dinkes Kota Batam

BADAN DAERAH (5 PD)

1. Bapelitbangda (A)
2. BPKAD (A)
3. Bapenda (A)
4. BKPSDM (A)
5. Badan Kesbangpol (A)

ALUR KOORDINASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

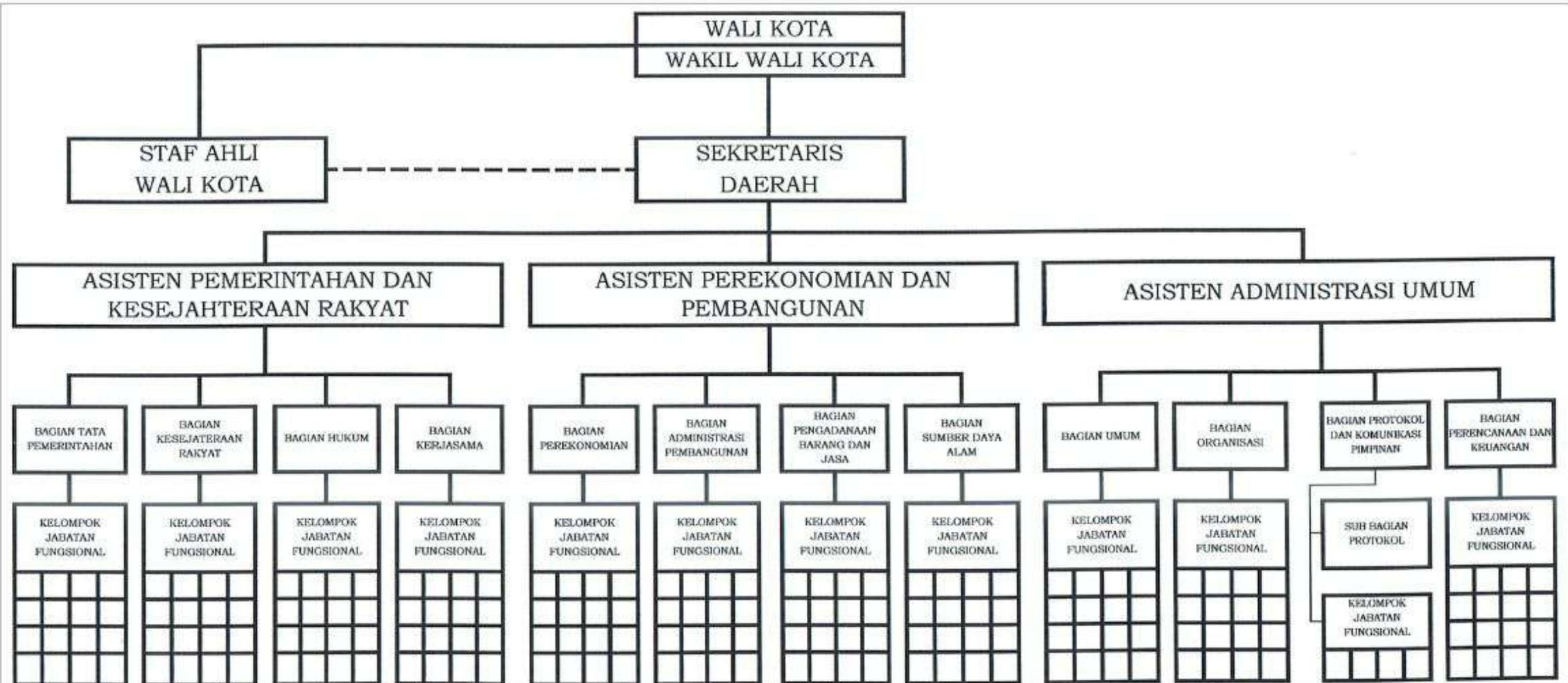



**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BATAM,**

H. JEFRIDIN, M.Pd
 Pembina Utama Madya
 NIP. 196812251998021006

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM

DASAR HUKUM
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2021
PERWAKO NOMOR 9 TAHUN 2022
PERWAKO NOMOR 67 TAHUN 2022



ASISTEN PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Bagian Tata Pemerintahan

- Seluruh Perangkat Daerah terkait Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Standar Pelayanan Minimal
- Koordinasi RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Karang Taruna.
- Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Batam
- Batas Wilayah dan Pembangunan Kawasan perbatasan
- Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah
- Fasilitasi dan Koordinasi Pergantian Antar Waktu pimpinan dan anggota legislatif
- Fasilitasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian izin cuti Kepala Daerah
- penyusunan kebijakan Pelimpahan wewenang Walikota kepada Camat
- Fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah

Bagian Hukum

- Seluruh Perangkat Daerah terkait Produk Hukum dan JDIH
- Seluruh Perangkat Daerah terkait regulasi perizinan
- Inspektorat Daerah terkait pelaksanaan WBS dan Gratifikasi
- Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK dan perlindungan Hak Asasi Manusia
- Fasilitasi kerjasama dalam penanganan perkara hukum

Bagian Kesejahteraan Rakyat

- Seluruh Perangkat Daerah terkait Hibah, Bantuan Sosial kepada Badan/Lembaga, Organisasi Masyarakat, sarana peribadatan, kelompok masyarakat, dan Individu/keluarga
- Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat
- Dinas Kesehatan
- Dinas Pendidikan
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
- Dinas Pemuda dan Olahraga
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Dinas Perhubungan
- Dinas Tenaga Kerja

Bagian Kerjasama

- Seluruh Perangkat Daerah terkait kerjasama antar lembaga
- Dinas Penanaman Modal dan PTSP terkait MoU dan Perjanjian Kerjasama dan investasi
- Koordinasi pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan

ASISTEN PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

MENGOORDINASIKAN

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Pertanahan
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7. Satuan Polisi Pamong Praja
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Bagian Perekonomian

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Dinas Koperasi dan UKM
- Dinas Tenaga Kerja
- Dinas Ketahanan Pangan
- Pengkoordinasian BUMD dan BLUD
- Pengkoordinasian TPID
- Pengkoordinasian Perangkat Daerah terkait Perizinan

Bagian Administrasi Pembangunan

- Semua Perangkat Daerah terkait Rencana Fisik dan Keuangan, , Monitoring dan Evaluasi, E-Gov, Dana Alokasi Khusus.
- Dinas Bina Marga SDA
- Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
- Bapelitbang

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

- Semua Perangkat Daerah terkait Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan serta Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Bagian Sumber Daya Alam

- Dinas Ketahanan Pangan
- Dinas Perikanan
- Dinas Lingkungan Hidup
- Pengkoordinasian penetapan Tarif Dasar Listrik
- Pengkoordinasian Ketersediaan Sembilan Bahan Pokok

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

MENGOORDINASIKAN

1. Dinas Ketahanan Pangan
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3. Dinas Tenaga Kerja
4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
5. Dinas Perikanan
6. Dinas Lingkungan Hidup
7. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
8. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
9. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan
10. Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Bagian Umum

- Kepegawaian Setdako
- Rumah Tangga Pimpinan
- Akomodasi Rapat
- Kendaraan Operasional dan BBM lingkup Setdako Batam
- Sarana dan Prasarana Setdako
- ATK Setdako Batam
- Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Setdako Batam
- Pengelolaan kearsipan lingkup Setdako Batam

Bagian Organisasi

- Semua Perangkat Daerah terkait:
- Kelembagaan (Struktur Organisasi Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi, Analisis Jabatan dan Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Standar Kompetensi Jabatan)
 - Pelayanan Publik dan Tatalaksana (Peta Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur, Survei Kepuasan Masyarakat, Evaluasi Pelayanan Publik, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, SP4N! LAPOR, Tata Naskah Dinas, Pakaian Dinas)
 - Kinerja dan RB (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Reformasi Birokrasi, Budaya Kerja, Perjanjian Kinerja)
 - BKPSDM terkait struktur kelembagaan dan jabatan

Bagian Protokol

- Semua Perangkat Daerah terkait:
- Keprotokolan
 - Komunikasi Pimpinan
 - Informasi dan fasilitasi acara dan jadwal Pimpinan
 - Naskah Sambutan dan Pidato Pimpinan
 - Pengaturan Tamu dan Acara
 - Fasilitasi peliputan media dan notulensi kegiatan pimpinan
 - Korespondensi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

Bagian Perencanaan dan Keuangan

- Semua Perangkat Daerah terkait:
- Perencanaan dan Penganggaran Setdako
 - Penatausahaan keuangan dan Barang Milik Daerah lingkup Setdako Batam
 - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Lingkup Setdako Batam
 - Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Pohon Kinerja lingkup Setdako Batam
 - Badan Pendapatan Daerah
 - Badan Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

MENGOORDINASIKAN

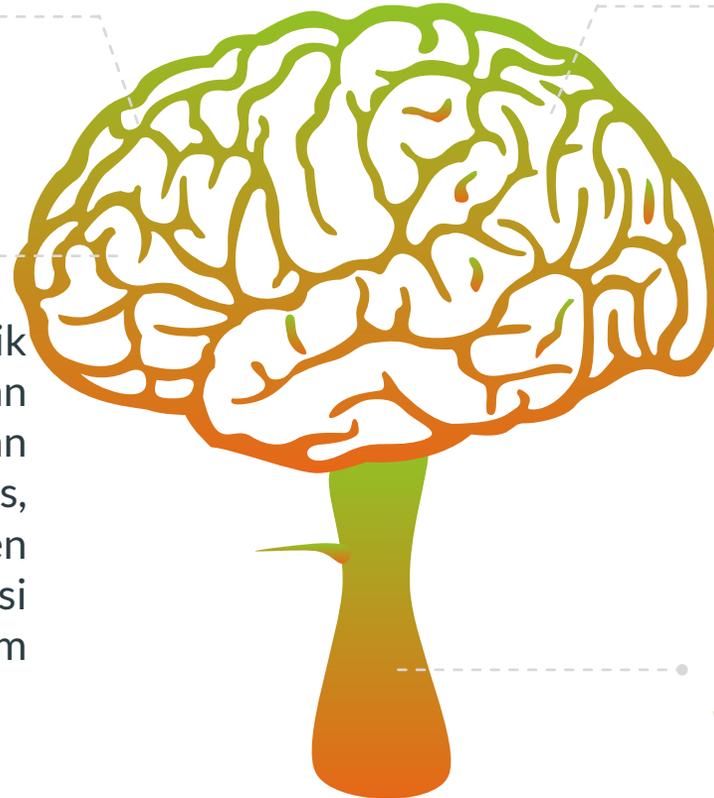
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Badan Pendapatan Daerah

Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik, serta **Peningkatan Sumber Daya Manusia**

Capaian peningkatan pelayanan publik berdasarkan output kunci yang telah ditetapkan, menjadi acuan utama bagi pimpinan unit organisasi



Peningkatan pelayanan publik diproyeksikan menghasilkan capaian yang signifikan melalui hasil sinergitas, kolaborasi, dan komitmen para stakeholders organisasi Pemerintah Kota Batam



Keberhasilan Peningkatan Sumber Daya Manusia



- **Apa yang ada dibenak dan angan saudara sebagai CPNS dalam menyikapi focus pembangunan Kota Batam tersebut?**



FUNGSI APARATUR SIPIL NEGARA

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014

Pasal 11

PELAKSANA KEBIJAKAN PUBLIK :
Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundangan ,

PEREKAT DAN PEMERSATU BANGSA:
Mempererat Persatuan dan Kesatuan NKRI



PELAYAN PUBLIK :
Pelayanan Publik yang Professional dan Berkualitas



AMANAT PENERAPAN SPM

Pasal 1 Butir 17: Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu **Pelayanan Dasar** yang merupakan **Urusan Pemerintahan Wajib** yang berhak **diperoleh** setiap warga negara secara minimal

Pasal 18: Penyelenggara Pemerintahan Daerah **memprioritaskan** pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan **Pelayanan Dasar**

UU 23/2014

Pasal 298: Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait **Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal**



URUSAN PEMERINTAH KONKUREN

WAJIB PILIHAN

- Pelayanan Dasar**
1. Pendidikan
 2. Kesehatan
 3. Pekerjaan Umum
 4. Perumahan Rakyat dan Permukiman
 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 6. Sosial

- Non-Pelayanan Dasar**
1. Tenaga Kerja
 2. Perlindungan Perempuan dan Anak
 3. Pangan
 4. Petanahan
 5. Lingkungan Hidup
 6. Administrasi dan Pencatatan Sipil
 7. Pemberdayaan Masyarakat Desa
 8. Pengendalian Penduduk dan KB
 9. Perhubungan
 10. Komunikasi-Informasi
 11. Koperasi dan UKM
 12. Penanaman Modal
 13. Keemudaan dan olah raga
 14. Statistik
 15. Persantian
 16. Kebudayaan
 17. Perpustakaan dan
 18. Arsip

- Potensi Ketenagakerjaan, Penggunaan Lahan**
1. Kelautan dan Perikanan
 2. Pariwisata
 3. Pertanian
 4. Kehutanan
 5. Energi dan Sumberdaya Mineral
 6. Perdagangan
 7. Perindustrian, dan
 8. Transmigrasi



43 JENIS LAYANAN DASAR

SPM

PROVINSI - 14

KABUPATEN/KOTA - 29

PENDIDIKAN 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Menengah • Pendidikan Khusus 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Anak usia dini • Pendidikan Dasar • Pendidikan Kesetaraan
KESEHATAN 	<p>PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, dan • Pada kondisi kejadian luar biasa provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ibu hamil • Ibu bersalin • Bayi baru lahir • Balita • Pada usia pendidikan dasar • Pada usia produktif • Pada usia lanjut • Penderita hipertensi • Penderita diabetes mellitus • Orang dengan gangguan jiwa berat • Orang terduga tuberculosi • Orang dengan resiko terinfeksi HIV
PEKERJAAN UMUM 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota • Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari • Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
PERUMAHAN RAKYAT 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi • Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintahan daerah provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota • Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab/kota
TRANTIBUMLINMAS 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketenteraman dan ketertiban umum <p>PELAYANAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi rawan bencana • Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana • Penyelamatan dan evakuasi korban bencana • Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
SOSIAL 	<p>REHABILITASI SOSIAL DASAR : DIDALAM PANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyandang disabilitas terlantar • Anak terlantar • Lanjut usia terlantar • Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis • Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi 	<p>REHABILITASI SOSIAL DASAR : DILUAR PANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyandang disabilitas terlantar • Anak terlantar • Lanjut usia terlantar • Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis • Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota



TIM PENERAPAN SPM DI DAERAH

 **PROVINSI**
Sesuai Pasal 19 ayat 2 Pada Permendagri 59 Tahun 2021

- Penanggung Jawab : Gubernur
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
- Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi atau sebutan lain
- Anggota :
 1. Kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar;
 2. Kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 3. Kepala inspektorat daerah;
 - 4. Kepala dinas komunikasi dan informatika;**
 - 5. Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil;**
 - 6. Kepala Dinas Pemerintahan Desa; dan**
 7. Kepala perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

 **KABUPATEN/KOTA**
Sesuai Pasal 21 ayat 2 Pada Permendagri 59 Tahun 2021

- Penanggung Jawab : Bupati/wali kota
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten/Kota atau sebutan lain;
- Anggota :
 1. Kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar;
 2. Kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 3. Kepala inspektorat daerah;
 - 4. Kepala dinas komunikasi dan informatika;**
 - 5. Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil;**
 - 6. Kepala Dinas Pemerintahan Desa; dan**
 7. Kepala perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

Tim Penerapan SPM daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan kepala daerah



SANKSI ADMINISTRATIF

Kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah yang tidak melaksanakan SPM dijatuhi sanksi administratif.



Sanksi Administratif :

- Teguran tertulis;
- Tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 bulan;
- Tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 bulan;
- Penundaan evaluasi rancangan Perda;
- Pengambilalihan kewenangan perizinan;
- Penundaan atau pemotongan DAU dan/atau dana bagi hasil;
- Mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan;
- Pemberhentian sementara selama 3 bulan
- Pemberhentian

PP 12/2017 Pasal 37 (4)

Kompeten

Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

Harmonis

Kami saling peduli dan menghargai perbedaan

Loyal

Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

Akuntabel

Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Adaptif

Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

Berorientasi Pelayanan

Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat

Kolaboratif

Kami membangun kerja sama yang sinergis

SURAT EDARAN WALIKOTA BATAM NOMOR 64 TAHUN 2021

Setiap Perangkat Daerah Di Lingkungan pemerintah Kota Batam agar melakukan internalisasi secara paralel agar meningkatkan kesadaran terkait Core Values BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa, serta budaya kerja "RAMAH" diantaranya melalui :

- a. Penggunaan logo BerAKHLAK dan tagar Bangga Melayani Bangsa dalam poster konten media sosial, latar virtual, twibbon, bahan paparan dan lain-lain.
- b. Penyisipan informasi BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa serta budaya kerja "RAMAH" dalam setiap kegiatan seperti apel, rapat, koordinasi/pertemuan, sosialisasi dan lain-lain.

- c. Penulisan panduan perilaku BerAKHLAK dan serta budaya kerja "RAMAH" dalam konten media sosial, x-banner dan media lainnya.
- d. Pemutaran video panduan perilaku BerAKHLAK dan serta budaya kerja "RAMAH" di media sosial, media elektronik dan media lainnya.
- e. Pemberian apresiasi atau hal-hal lain kepada pegawai ASN sebagai bentuk Bangga Melayani Bangsa.
- f. Penguatan peran Agen perubahan Reformasi Birokrasi.
- g. Atau dapat ditambahkan dengan metode lain yang relevan, kreatif dan inovatif sesuai dengan karakter masing-masing.
- h. Untuk keseragaman penggunaan logo BerAKHLAK, tagar Bangga Melayani Bangsa dan contoh konten video BerAKHLAK dapat di unduh pada tautan berikut <https://bit.ly/BahanInternalisasiCoreValues>.

GALERY INTERNALISASI Budaya Kerja BerAKHLAK



CORE VALUES ASN

BUDAYA KERJA BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Kompeten Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas	Harmonis Kami saling peduli dan menghargai perbedaan	Loyal Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
Akuntabel Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan	BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif	Adaptif Kami terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan ataupun menghadapi perubahan
Berorientasi Pelayanan Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat	Kolaboratif Kami membangun kerja sama yang sinergis	

Mewujudkan Visi Kota Batam
"Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera"



SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
BAGIAN ORGANISASI
<https://bagorganisasi.go.id>

H. Jefridin, M.Pd
Sekretaris Daerah Kota Batam

Jl. Engku Putri No. 01, Tlk. Tering, Kec. Batam Kota
Kota Batam - Kepulauan Riau
29444



BUDAYA KERJA BerAKHLAK

PERATURAN WALIKOTA NO. 35 TAHUN 2021

CORE VALUES ASN

Kompeten Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas	Harmonis Kami saling peduli dan menghargai perbedaan	Loyal Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
Akuntabel Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan	BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif	Adaptif Kami terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan ataupun menghadapi perubahan
Berorientasi Pelayanan Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat	Kolaboratif Kami membangun kerja sama yang sinergis	



SEKRETARIAT DPRD
KOTA BATAM
<https://dprd.batam.go.id/>

Jl. Engku Putri, Baloi Permai, Kec. Batam Kota
Kota Batam - Kepulauan Riau

TWIBBON ASN BERAKHLAK DAN RAMAH KOTA BATAM



<https://twb.nz/asn-berakhlak2022>

RENCANA VIDEO SOSIALISASI ASN BERAKHLAK DAN RAMAH KOTA BATAM

NARASI VIDEO SOSIALISASI BUDAYA KERJA BerAKHLAK dan RAMAH WALIKOTA BATAM



H. M RUDI

CORE VALUES ASN TELAH DITETAPKAN OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO/ BERAKHLAK AKRONIM DARI BERORIENTASI PELAYANAN/ AKUNTABEL / KOMPETEN/ HARMONIS / LOYAL / ADAPTIF / DAN KOLABORATIF /

DI TINGKAT KOTA BATAM / KITA MEMILIKI BUDAYA KERJA UNGGUL RAMAH / YANG MERUPAKAN AKRONIM DARI RESPEK / ADIL / MAJU / AKUNTABEL / DAN HANDAL /

SAYA SELAKU WALIKOTA BATAM/ MENGAJAK DAN MENEGASKAN / AGAR SELURUH ASN PEMERINTAH KOTA BATAM / MEMPEDOMANI DAN MEMBUDAYAKAN / CORE VALUES DAN BUDAYA KERJA TERSEBUT / DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN / KEPADA MASYARAKAT KOTA BATAM //

NARASI VIDEO SOSIALISASI BUDAYA KERJA BerAKHLAK dan RAMAH WAKIL WALIKOTA BATAM



H. AMSAKAR ACHAMD

CORE VALUES BERAKHLAK / MENGERGAKAN PERCEPATAN TRANSFORMASI SDM APARATUR / TERDIRI DARI BERORIENTASI PELAYANAN / BERKOMITMEN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA / DEMI KEPUASAN MASYARAKAT //

PANDUAN PERILAKUNYA ADALAH:

1. MEMAHAMI DAN MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT
2. RAMAH, CEKATAN, SOLUTIF DAN DAPAT DIANDALKAN
3. MELAKUKAN PERBAIKAN TIADA HENTI

NARASI VIDEO SOSIALISASI BUDAYA KERJA BerAKHLAK dan RAMAH SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



H. JEFRIDIN, M.PD

AKUNTABEL / KAMI BERTANGGUNGJAWAB ATAS KEPERCAYAAN YANG DIBERIKAN //

PANDUAN PERILAKUNYA ADALAH:

1. MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN JUJUR, BERTANGGUNGJAWAB, CERMAT, DISIPLIN DAN BERINTEGRITAS TINGGI.
2. MENGGUNAKAN KEKAYAAN DAN BARANG MILIK NEGARA SECARA BERTANGGUNGJAWAB, EFEKTIF DAN EFISIEN
3. TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN JABATAN

NARASI VIDEO SOSIALISASI BUDAYA KERJA BerAKHLAK dan RAMAH ASISTEN ADMINISTRASI & UMUM



DRS. HERIMAN HK

KOMPETEN / TERUS BELAJAR DAN MENINGKATKAN KAPABILITAS //

PANDUAN PERILAKUNYA ADALAH:

1. MENINGKATKAN KOMPETENSI DIRI UNTUK MENJAWAB TANTANGAN YANG SELALU BERUBAH
2. MEMBANTU ORANG LAIN BELAJAR
3. MELAKSANAKAN KERJA DENGAN KUALITAS TERBAIK

Tolok Ukur Pelayanan Publik Yang Profesional



Komunikatif

Pelaksana pelayanan publik harus komunikatif. Ramah, santun serta memberi informasi yang lengkap dan jelas



Cepat

Hal ini agar masyarakat mendapatkan rasa nyaman dan tepat waktu



Tidak Menerima Suap/ Gratifikasi



Responsif

Cepat tanggap atas apa yang menjadi keperluan pelanggan dan perhatian penuh pada kepentingan pelanggan



Memberi Kejelasan Pelayanan dan Kenyamanan kepada Pelanggan



www.ombudsman.go.id



Ombudsman
Republik Indonesia



@OmbudsmanRI137



ombudsmanri137



Ombudsman RI

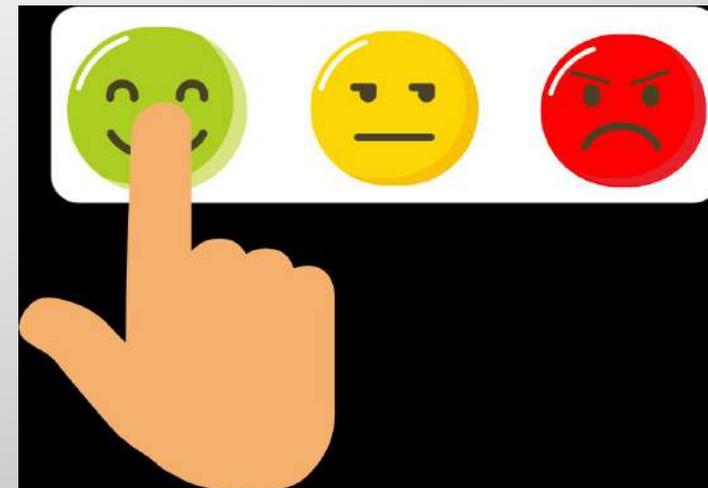


Hubungi: 137

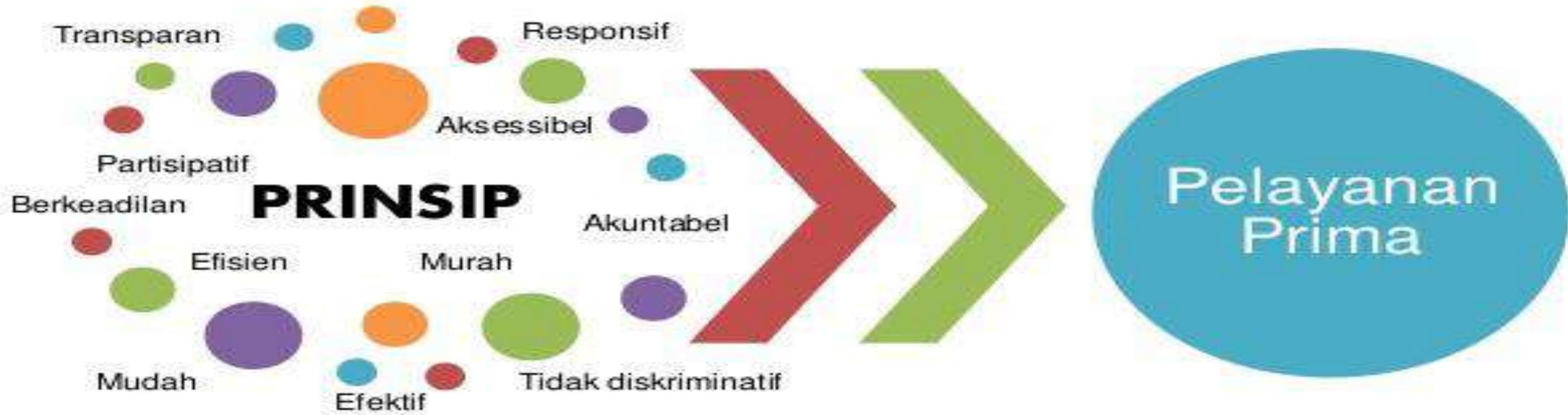


0821 3737 3737

3 Unsur Penting Pelayanan Publik



Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik





TAPPING BOX

TINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH

Pemko Batam terus menggesa pemasangan alat perekam transaksi atau tapping box di hotel, restoran, tempat hiburan, dan parkir di Batam. Pemasangan tapping box ini meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Batam.

PEMASANGAN TAPPING BOX 2019
TAPPING BOX 2019

HOTEL		RESTORAN	
JUMLAH WAJIB PAJAK	263	JUMLAH WAJIB PAJAK	1.293
TERPASANG TAPPINGBOX	86	TERPASANG TAPPINGBOX	372
HIBURAN		PARKIR	
JUMLAH WAJIB PAJAK	528	JUMLAH WAJIB PAJAK	35
TERPASANG TAPPINGBOX	58	TERPASANG TAPPINGBOX	11



APBD BATAM 2020
RP3,013 TRILIUN

TARGET PAD BATAM 2020
RP1,499 TRILIUN

BATAM JUARA FAVORIT

LOMBA INOVASI DAERAH

Batam menjadi juara favorit di Lomba Inovasi Daerah dalam Tatanan Normal Baru 2020. Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian kepada Wakil Walikota Batam H Amsakar Achmad di Jakarta, Senin (22/6).

BATAM
NEWNORMAL

@katabatam



FOTO: DINAS KOMINFO KABUPATEN BATAM

Presentasi dan Wawancara KIPP 2021 Inovasi Tapping Box | Optimalisasi Pajak Daerah

Tahap presentasi dan wawancara dilakukan secara daring oleh Tim Panel Independen Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia guna mendapatkan Top Inovasi Terpuji pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2021.



TOP 45 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2021

PEMERINTAH PROVINSI

- D.I Yogyakarta – Rajutan Sibakul Jogja (Cara Jitu Usaha Tangguh dengan Sistem Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha)
- Provinsi Jawa Barat - AKSI TALI INTAN (Aksi Petani Peduli Perlindungan Tanaman)
- Provinsi Papua Barat - Mini Cattle Yard Solusi Pelayanan Terpadu (MC YARD SIPANDU) Sapi Potong di Provinsi Papua Barat
- Provinsi Sulawesi Selatan - Gesit-19 (Gerai Perizinan Sektor Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan)

PEMERINTAH KOTA

- Kota Balikpapan - DIGITASI (Data dan Informasi Digital Tanaman Koleksi) Kebun Raya Balikpapan
- Kota Batam - Tapping Box Optimalisasi Pajak Daerah
- Kota Denpasar - Nayaka Prana (Pelayanan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak)
- Kota Makassar - SENTUH PUSTAKA (Semua Membantu Menghidupkan Perpustakaan)



Penghargaan Tingkat Nasional

BKN AWARD 2021

Peringkat 1

Pemerintah Kota Tipe A

Kategori

Perencanaan Kebutuhan,
Pelayanan, Pengadaan,
Kepangkatan dan Pensiun

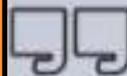


Bkatabatam

PEMKO BATAM DAPAT PENGHARGAAN DARI KPK

CAPAIAN MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP) TERTINGGI SE-KEPRI

Pemko Batam mendapatkan nilai tertinggi capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2020 se-KePRI, dengan capaian 84 poin. Hal ini mendapat apresiasi langsung dari Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah se-KePRI di Tanjungpinang, Rabu (24/3/2021).



Satu prestasi yang luar biasa, misalnya untuk Pemko Batam. Pada 2019 mencapai 75, kemudian tahun 2020 malah mencapai 84.

NAWAWI POMOLANGO, Wakil Ketua KPK

CAPAIAN MCP KABUPATEN/KOTA DI KEPRI

- BATAM -----> 84
- BINTAN -----> 83
- KARIMUN -----> 78
- ANAMBAS -----> 70
- TANJUNGPINANG --> 65
- NATUNA -----> 60
- LINGGA -----> 50



Pemko Batam akan terus berupaya meningkatkan penilaian MCP sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh KPK.

H MUHAMMAD RUDI-Walikota Batam

LAPORAN KEUANGAN 8 KALI WTP, KEMENKEU BERI PEMKO BATAM PENGHARGAAN



**PEMERINTAH KOTA BATAM
MASUK DAFTAR DAERAH
PENERIMA ALOKASI TRANSFER
DANA DESA
DAN PENGHARGAAN WTP
ATAS
LKPD TAHUN 2022
(WTP 10 KALI BERTURUT-TURUT)**

Kemendagri puji pelaksanaan transaksi nontunai di Batam

© Kamis, 18 Juli 2019 23:01 WIB



Sekretaris Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni memberikan sambutan dalam Rakor Nontunai se-Indonesia di Batam, Kamis. (Yunianti Jannatun Naim)





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPAU SATU PINTU
KOTA BATAM
MENERIMA PENGHARGAAN
SEBAGAI PENYELENGGARA
PELAYANAN PUBLIK
KATAGORI "SANGAT BAIK"
TAHUN 2020 DARI
KEMENPANRB RI**



Sekotoko Batam, Jefridin memimpin rapat koordinasi Tim Teknis OPD, Selasa (16/3/2021).

PEMKO BATAM PERCEPAT PERIZINAN

Semua Perizinan di Pemko Batam Kini Ditangani DPM-PTSP Kota Batam

Pemerintah Kota (Pemko) Batam berkomitmen terus mempercepat perizinan. Kini, seluruh perizinan yang selama ini ada di setiap OPD, ditangani Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Batam.

[KATA BATAM](#) [KATA BATAM](#) [BATAM, KATA](#) [KATABATAM.COM](#)

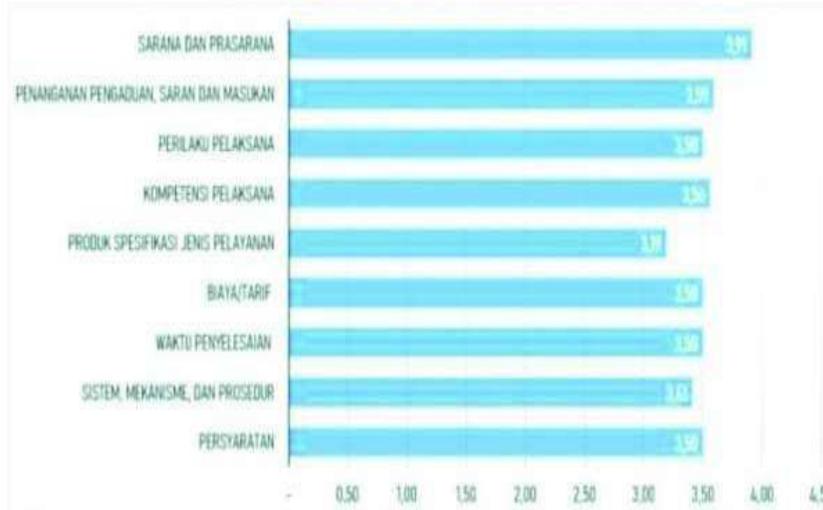


INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)



Semester 1 Tahun 2021

UNSUR PELAYANAN



NILAI RATA RATA = 3,6

MUTU PELAYANAN



KATAGORI : SANGAT BAIK



TERIMA
KASIH

